

BAB II

GAMBARAN UMUM SUBJEK PENELITIAN

Pada BAB II ini, peneliti akan menggambarkan subjek penelitian secara umum, dalam hal penelitian kali ini subjek penelitian peneliti akan menjelaskan tentang seorang Prabowo Subianto dan GNPf-MUI/Ulama, adapun dua hal tersebut ialah sebagai berikut:

A. Prabowo Subianto

1. Profil Prabowo Subianto

Letnan Jenderal (Purn) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo, lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951 adalah seorang tokoh nasional, politisi, pengusaha dan perwira tinggi Militer Indonesia. Prabowo berasal dari keluarga seorang ilmunan. Kakeknya, Margono Djojohadikusumo, merupakan pendiri Bank Negara Indonesia, pemimpin pertama Dewan Pertimbangan Agung Sementara, dan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).¹

Prabowo Subianto merupakan putra seorang ekonom terkenal Indonesia Soemitro Djojohadikusumo, pernah menjabat sebagai Menteri Negara Riset Indonesia, Menteri Perdagangan Indonesia, Menteri Keuangan Indonesia serta Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia. Semasa hidupnya Soemitro telah menulis buah pikirnya dalam

¹ Universitas Ciputra, *Biografi Prabowo Subianto*, <http://ciputrauceo.net>, diakses tanggal 11 Maret 2019

130 buku dan makalah dalam bahasa Inggris, juga mendapat sejumlah penghargaan bengensi dari dalam serta luar negeri.²

Ibu Prabowo Subianto adalah Dora Marie Sigar, lahir di Manado pada 21 September 1921, merupakan keturunan Manado-Jerman. Ayahnya bernama Philip FL Sigar, dan ibunya bernama N. Maengkom. Ayahnya merupakan anggota Gementeraad Manado (1920-19220 dan pejabat Sekretaris Residen (Gewestelijk Secretaris) Manado (1922-1924) merupakan putra dari Laurents A Sigar (meninggal 1910) E. Aling.³ Prabowo Subianto merupakan anak ketiga dari empat bersaudara yakni dua kakak perempuannya Biantiningsih Miderawati daan Maryani Le Maistre serta adik laki-laknya Hashim Suyono Djojohadikusumo.⁴

Prabowo Subianto telah menerima banyak penghargaan baik dalam maupun luar negeri. Adapun penghargaan tersebut antara lain, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun, Satya Lencana Seroja Ulangan-III, Satya Lencana Raksaka Dharma, Satya Lencana Wira Karya, dan Bintang Yudha Dharma Nararya serta The First Class The Padi Padin Medal Ops Honor dari Pemerintah Kamboja.⁵

² Lailatun Niqmah, *Silsilah Keluarga Prabowo Subianto: Ayah Ekonom hingga Trah Kerajaan Mataram*, <http://wow.tribunnews.com/2018/07/07/silsilah-keluarga-Prabowo-subianto-ayah-ekonom-hingga-trah-kerajaan-mataram?page=4>, diakses tanggal 09 Maret 2019.

³ *Ibid*

⁴ Redaksi Kompas, *Ibu Prabowo Meninggal di Singapura*, <https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 10 Maret 2019.

⁵ Badan komunikasi Partai Gerindra, *Riwayat Prabowo*, <http://Prabowosubianto.info>, diakses tanggal 11 Maret 2019

2. Riwayat Pendidikan Prabowo Subianto

Sebagai seorang anak dari pakar ekonomi besar Indonesia Soemitro Djojohadikusumo, Prabowo Subianto banyak menghabiskan waktunya dalam dunia pendidikan diluar negeri. Berikut ini daftar nama Intitusi pendidikan Prabowo Subianto:⁶

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1	TK	Sekolah Sumbangsih, Jakarta Indonesia	1956	1957
2	SD	The Dean School, Singapura	1957	1962
3	SD	Glenealy Junior School, Hongkong	1960	1962
4	SMP	Victoria Intitute, Kuala Lumpur, Malaysia	1962	1964
5	SMP	American International School Of Zurich, Swiss	1964	1966
6	SMA	The American School in London	1966	1968
7		Akademi Militer Nasional, Magelang, Indonesia	1970	1974

⁶ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Daftar Riwayat Hidup Prabowo Subianto*, <https://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2018/953>, diakses tanggal 10 Maret 2019

3. Riwayat Jabatan Prabowo Subianto

Sebagai seroang tokoh Militer, Politik dan Pengusaha, Prabowo Subianto telah menduduki berbagai macam jabatan didalam ketiga bidang tersebut, antara lain:⁷

- a. Komandan Peleton Para Komando Group-1 Kopassandha (1976)
- b. Komandan Kompi Para Komando Group-1 Kopassandha (1977)
- c. Wakil Komandan Detasemen-81 Kopassus (1983-1985)
- d. Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad (1985-1987)
- e. Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad (1987-1991)
- f. Kapala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17/Kujang I/Kostrad (1991-1993)
- g. Komandan Group-3/Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (1993-1995)
- h. Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus (1994)
- i. Komandan Komando Pasukan Khusus (1995-1996)
- j. Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (1996-1998)
- k. Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (1998)
- l. Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI (1998)
- m. Ketua Umum HKTI Periode 2004-2009
- n. Ketua Umum HKTI Periode 2010-2015

⁷ Badan komunikasi Partai Gerindra, *Riwayat Prabowo*, <http://Prabowosubianto.info>, diakses tanggal 11 Maret 2019

- o. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) Periode 2001-2011
- p. Komisaris Perusahaan Migas Karazanbasmunai di Kazakhstan
- q. Komisaris Utama PT Tidar Kerinci Agung
- r. Presiden dan CEO PT Nusantara Energy
- s. Presiden dan CEO PT Jaladri Nusantara
- t. Dewan Penasihat Organisasi Kosgoro
- u. Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan (Universitas Kebangsaan)
- v. Pendiri Koperasi Swadesi Indonesia (KSI)

4. Karier Militer Prabowo Subianto

Pada tahun 1970, Prabowo Subianto memutuskan untuk masuk Akademi Militer Nasional (AMN) yang ada di Magelang Jawa Tengah, atas sponsor Kepala Intelejen Negara yang pada saat itu dijabat oleh Sutopo Juwono.⁸ Dalam Akademi inilah Prabowo Subianto mulai mengenal dunia Militer, mulai dari strategi bertahan hidup (sebagai tentara), strategi perang, sampai peralatan alutsista.⁹

Prabowo mengaku bahwa meski sejak kecil ia sangat menyukai dunia Militer, namun baru kali ini cita-citanya kesampaian. Menurut Prabowo Militer itu sangat penting, ia mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia selalu memikirkan untuk menjadi anggota Militer. “Seharunya beberapa diantara kita berada didalam Militer, saudara-

⁸ Ade Ma’ruf, (2017), *Prabowo Subianto: Jalan Terjal Seorang Jenderal*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, h. 48.

⁹Badan komunikasi Partai Gerindra, *Riwayat Prabowo*, <http://Prabowosubianto.info>, diakses tanggal 11 Maret 2019

saudara jadilah teknokrat, pada suatu hari kita akan berjumpa dan ambil bagian dalam memodernkan negeri kita”, tuturnya.¹⁰

Sebelum masuk di Akademi Militer ini, Prabowo sebenarnya sudah diterima di University Of Colorado dan George Washington University Amerika Serikat. Akan tetapi, ia malah memilih belajar di Akademi Militer dari pada belajar dibangku kuliah.¹¹

Prabowo Subianto menyelesaikan pendidikannya di Akademi Militer Nasional (AMN), dalam waktu 4 tahun berarti tahun 1974.¹² Dua tahun kemudian ia bergabung dengan Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopasandha) yang merupakan cikal bakal Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Dari Kopasandha inilah karier Militer seorang Prabowo Subianto mulai melejit apalagi setelah ia menikahi Siti Hediati Hariyadi yang tidak lain adalah Putri dari Presiden Soeharto pada saat itu.

Sejarah mencatat, bahwa pada tahun 1976, Prabowo berhasil menjadi Komandan Pleton Group-1 Kopasandha yang ditugaskan sebagai bagian dari operasi TIM Naggala di Timor Timur.¹³ Setahun kemudian Prabowo juga berhasil menjadi Komandan Kompi Para Komando Group-1 Kopasandha. Sementara setelah menikah, Prabowo berhasil menjadi

¹⁰ Ade Ma'ruf, (2017), *Prabowo Subianto: Jalan Terjal Seorang Jenderal*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, h. 49.

¹¹ *Ibid.*, h. 48.

¹² Petrik Matanasi, *Karier Militer Prabowo: Melesat lalu terpeleset*, <https://tirto.id>, diakses tanggal 12 Maret 2019

¹³ Tempo.co, *Rekam Jejak Prabowo 24 Tahun Jadi Tentara*, <https://nasional.tempo.co>, diakses tanggal 12 Maret 2019

Wakil Komandan Detasemen-81 Penanggulangan Teror (Gultor) Kopassus Tahun 1983-1985.¹⁴

Kemudian, ia berhasil menjadi Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad tahun 1985-1987. Karier Prabowo terus melejit, pada tahun 1987-1991 Prabowo menjadi Komandan Batalyon Infanteri Lintas udara 328 Kostrad, Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17/Kujang I/Kostrad Tahun 1991-1993, Komandan Group-3/Pusat pendidikan Pasukan Kusus Tahun 1993-1994, Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus 1994, Komandan Komando Pasukan Khusus Tahun 1995-1998.¹⁵

Sebagai Komandan Kopassus terdapat sebuah prestasi yang sangat heroik dilakukan oleh Prabowo Subianto dan tim Kopassusnya, yakni berhasil membebaskan 12 peneliti anggota Tim Ekpedisi Lorentz yang beranggotakan warga negara asing. Kedua belas orang peneliti ini telah disandera oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan dapat diselamatkan setelah disandera selama 130 hari di Mapenduma Irian Jaya dalam Operasi Rajawali.¹⁶

Melihat Karier anaknya yang begitu cepat melejit, Soemitro ayah Prabowo berkomentar, “Kenaikan pangkat yang cepat dari anak saya itu

¹⁴ Akbar Bayu Tamtomo, *INFOGRAFIK: Prabowo Subianto*, <https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 12 Maret 2019

¹⁵ Petrik Matanasi, *Karier Militer Prabowo: Melesat lalu terpeleset*, <https://tirto.id/karier-Militer-Prabowo-melesat-lalu-terpeleset-ctGX>, diakses tanggal 12 Maret 2019

¹⁶ Yulistyo Pratomo, *Kisah Kopassus bebaskan sandera di papua sampai dipuji dunia*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-kopassus-bebaskan-sandera-di-papua-sampai-dipuji-dunia-splitnews-2.html>, diakses tanggal 13 Maret 2019

sudah jelas mengundang ketidaksenangan bagi beberapa orang. Kondisi kecemburuan seperti ini sudah merupakan sifat umum dari manusia dimana pun”.¹⁷

5. Kontroversi Prabowo Subianto

Prabowo merupakan orang yang watak bela negara dan emosinya yang relatif tinggi, selain keputusan-keputusan Militernya yang dinilai tegas, bahkan sampai melawan perintah atasan. Karena itulah Prabowo terseret banyak kasus kontroversi, mulai dari dugaan keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis, otak kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, konspirasi pembungkaman media kritis selama Orba, Pelanggaran HAM di Timor Timur serta Isu Kudeta terhadap Presiden B.J Habibie.¹⁸

Pada periode 1997-1998 merupakan tahun-tahun yang berat bagi Republik Indonesia, suhu perpolitikan memanas, demonstrasi massa begitu masif terjadi, Pemerintahan Orde Baru goyah akibat krisis moneter yang melanda Indonesia. Pada periode ini pula Prabowo dituduh mendalangi penculikan terhadap aktivis Pro-Reformasi.

Terdapat 13 orang yang dikabarkan hilang dalam kasus penculikan ini, termasuk diantaranya Herman Hendrawan, Petrus Bima, dan Seniman Teater Rakyat Widji Thukul. Penculikan ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu menjelang Pemilu Mei 1997, menjelang pelaksanaan sidang

¹⁷ Badan komunikasi Partai Gerindra, *Riwayat Prabowo*, <http://Prabowosubianto.info>, diakses tanggal 11 Maret 2019

¹⁸ Tirto.id, *Prabowo Subianto Djojohadikusumo*, <https://tirto.id>, diakses tanggal 12 Maret 2019.

MPR pada bulan maret 1998, serta tepat menjelang pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998.¹⁹

Mengenai penculikan tersebut Prabowo mengaku bahwa ia hanya memerintahkan Tim Mawar untuk menculik sembilan orang aktivis yang kesemuanya sudah dilepaskan kembali setelah diculik. Para aktivis tersebut ialah Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Faisol reza, Rahardjo Walujo Djati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, dan Mugianto serta Andi Arief.

Berdasarkan data yang ditemukan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), Komnas HAM dan Komunitas Semanggi Peduli, total aktivis yang ditangkap/diamankan/diculik sebanyak 24 orang. Adapun 9 orang yang ditangkap Tim Mawar pasukan Kopassus Prabowo, 9 orang ditangkap dalam operasi Mantap Jaya dibawah perintah Panglima TNI Wiranto, dan 6 orang ditangkap pasukan lain. Sementara 9 orang yang diculik oleh Tim Mawar dibebaskan, kemudian 15 orang yang di tangkap dalam operasi Mantap Jaya dan Pasukan lain menghilang sampai hari ini.²⁰

Selanjutnya, pada Mei 1998 Prabowo dituduh akan melakukan kudeta dan menggerakkan tentara ke Jakarta dan sekitar kediaman Presiden B.J Habibie. Karena tuduhan rencana kudeta tersebut, Prabowo

¹⁹ Badan komunikasi Partai Gerindra, *Riwayat Prabowo*, <http://Prabowosubianto.info>, diakses tanggal 11 Maret 2019

²⁰ Ratu Adil, *Fakta Kunci Tuduhan Penculikan Prabowo*, <https://www.kompasiana.com>, diakses tanggal 12 Maret 2019

diberhentikan (secara hormat) dari jabatannya sebagai panglima Kostrad oleh Wiranto atas perintah presiden B.J Habibie.

Atas pemberhentiannya tersebut Prabowo memberikan komentar, “Keputusan memecat saya merupakan sah. Saya tahu banyak diantara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi, saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya, saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat diatas posisi saya sendiri. Saya adalah prajurit yang setia, setia kepada Negara, setia kepada Republik.”²¹

6. Prabowo Subianto Mengasingkan diri di Luar Negeri

Begitu banyak tuduhan kejahatan yang menimpanya membuat Prabowo meninggalkan tanah air. Ia kemudian dikabarkan mengasingkan diri untuk berobat di Jerman²² dan Yordania, di kedua negara tersebut, Prabowo membangun bisnis bersama adiknya Hashim Djojohadikusumo.

Berulang kali Prabowo berniat untuk kembali ketanah air. Namun, niatnya itu selalu diurungkan atas dasar keamanan dirinya, nasihat tersebut di sampaikan oleh Ahmad Seomargono, Ketua Komite Indonesia dan Fadli Zon Ketua Partai Bulan Bintang, untuk tetap menetap di salah satu dari kedua Negara tersebut, dengan alasan bahwa Prabowo akan ditembak mati oleh para Sniper jika ia kembali ke tanah air. Atas dasar

²¹ Badan komunikasi Partai Gerindra, *Riwayat Prabowo*, <http://Prabowosubianto.info>, diakses tanggal 11 Maret 2019

²² Ade Ma'ruf, (2017), *Prabowo Subianto: Jalan Terjal Seorang Jenderal*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, h. 124.

keamanan dan kekecewaan karena tuduhan yang di tujukan kepadanya Prabowo percaya dengan nasihat kedua orang ini.²³

Tidak banyak kabar mengenai kegiantan apa yang dilakukan oleh Prabowo di Jerman dan Yordania oleh media tanah air, Prabowo menjelaskan bahwa aktivitasnya adalah merintis bisnis keluarganya dibidang perdagangan umum. Namun, diluar berbisnis, Prabowo dikabarkan mempunyai aktivitas memberikan ceramah disebuah sekolah komando angkatan bersenjata.²⁴ Dikuatkan dengan diberitakan oleh seorang wartawan Jerman, ”ia beberapa kali memberi ceramah disebuah sekolah komando angkatan bersenjata di Jerman.”

Kehidupan Prabowo di Jerman mendapatkan perlindungan istimewa dari Pemerintah setempat. Setelah ditelusuri lebih lanjut, hal ini sepertinya ada kaitannya dengan aktivitasnya memberkan ceramah tersebut juga konon berkat jasa Habibie yang turut melobi Pemerintah Jerman²⁵. Sementara itu di Yordania, Prabowo juga mendapatkan perlindungan istimewa dari Raja Abdullah yang diketahui merupakan teman dekat Prabowo. Di Yordania, Prabowo dikabarkan melatih tentara Militer setempat.

Dalam bebrapa tahun tinggal di Jerman dan Yordania, Prabowo berkali-kali mendapatkan surat dari Wiranto untuk menghadiri pesta HUT-TNI. Namun kembali Fadli Zon menasehati bahwa ada maksud

²³ Badan komunikasi Partai Gerindra, *Riwayat Prabowo*, <http://Prabowosubianto.info>, diakses tanggal 11 Maret 2019

²⁴ Ade Ma'ruf, (2017), *Prabowo Subianto: Jalan Terjal Seorang Jenderal*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, h. 129

²⁵ *Ibid.*, h. 128.

terselubung dari undangan Wiranto tersebut yakni untuk menangkap Prabowo karena banyaknya kasus didalam negeri yang menyangkut keamanan negara dan melibatkan Prabowo.²⁶

7. Karier Bisnis Prabowo Subianto

Seperti yang telah disebutkan diatas oleh penulis, bahwa Prabowo Subianto bukan hanya berkarier dibidang Militer dan Politik, melaikan juga didalam bidang usaha. Prabowo Subianto memiliki dan memimpin 27 Perusahaan di Indonesia dan diluar Negeri, Prabowo merupakan Presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit.²⁷

Sepulang dari Yordania pada November 2001, Prabowo mendirikan PT Nusantara Energy bersama Johan Teguh Sugianto dan Widjono Hardjanto. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang Migas, Pertambangan, Pertanian, Kehutanan, dan PULP, juga PT Jaladri Nusantara yag bergerak dibidang perikanan.²⁸

Setelah terjadi perubahan Pemerintahan dan perpolitikan pasca jatuhnya Orde Baru dan dimulainya masa reformasi, Prabowo mengakhiri kariernya dibidang kemiliteran. Ia memilih untuk mengikuti karier adiknya, Hashim Djojohadikusumo, dan menjadi pengusaha. Karier Prabowo sebagai pengusaha dimulai dengan membeli kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di

²⁶ Badan komunikasi Partai Gerindra, *Riwayat Prabowo*, <http://Prabowosubianto.info>, diakses tanggal 11 Maret 2019

²⁷ *Idid.*

²⁸ Ade Ma'ruf, (2017), *Prabowo Subianto: Jalan Terjal Seorang Jenderal*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, h. 144

Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto. Prabowo membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai Rp. 1,8 triliun dan Bank Mandiri.²⁹

Selain mengelola Kiani kertas, yang namanya diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara, kelompok Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan didalam maupun luar negeri. Usaha-usaha yang dimiliki oleh Prabowo bergerak dibidang Perkebunan, Tambang, Kelapa Sawit, dan Batu Bara.

Pada Pilpres tahun 2009, Prabowo ialah Cawapres terkaya, dengan total aset sebesar Rp. 1,579 Triliun dan US\$. 7.75 Juta, termasuk 84 ekor kuda istimewa yang sebagian harganya mencapai 3 Miliar per ekor serta sejumlah mobil mewah seperti BMW 750Li dan Mercedes Benx E300. Kekayaanya ini besarnya belipat 160 kali dari kekayaan yang dia laporkan pada tahun 2003. Kala itu ia hanya melaporkan kekayaan sebesar 10,152 miliar.³⁰

Namun, pada tahun 2011, dilaporkan bahwa PT Kertas Nusantara memiliki 161 kreditor, yang terdiri terdiri dari 136 kreditor konkuren, 18 kreditor istimewa, dan 7 kreditor separatis. Berdasarkan verifikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, total utang Kertas Nusantara pada saat itu mencapai Rp 14,31 triliun. Bahkan pada tanggal 9 Juni 2011, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memerintahkan kepada PT Kertas

²⁹ Badan komunikasi Partai Gerindra, *Riwayat Prabowo*, <http://Prabowosubianto.info/> , diakses tanggal 11 Maret 2019

³⁰ *Ibid.*

Nusantara agar membayar utang sebesar Rp 142 miliar kepada PT Multi Alphabet sebagai salah satu kreditor dalam waktu 45 hari, dan bila tidak Kertas Nusantara terancam dinyatakan bangkrut. Namun, pada tanggal 21 Juli 2011, PT Kertas Nusantara selamat dari ancaman kebangkrutan setelah 89% kreditor setuju untuk memberikan perpanjangan masa pembayaran utang.³¹

8. Karier Politik Prabowo Subianto

Karier Politik seorang Prabowo diawali dengan dirinya bergabung bersama Partai Golkar, Kemudian mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada Konvensi capres Golkar tahun 2004. Pada Konvensi calon Presiden Partai Golkar tahun 2004, Prabowo kalah perolehan suara dari Wiranto di putaran terakhir, Prabowo mengatakan “Kalau bukan karena dorongan dari teman-teman dan panggilan nurani untuk ikut memulihkan negara dari kondisi keterpurukan, ingin rasanya saya tetap mengabdikan dijalur bisnis. Saya ingin jadi petani.”³²

Prabowo mengakui bahwa keikutsertaannya dalam dunia Politik, dalam konvensi Partai Golkar bukan dilatarbelakangi atas hasrat, apalagi ambisi untuk berkuasa. Ia sering mengucapkan bahkan sejak masih aktif di dunia kemiliteran, dirinya telah bersumpah untuk mengisi hidupnya dengan pengabdian kepada bangsa dan rakyat Indonesia.

Prabowo mencalonkan dirinya sebagai Ketua Umum Himpunan Tani Indonesia (HKTI), dalam Munas VI HKTI dan Kongres V Petani 5

³¹ *Ibid.*

³² Partai Gerindra, *Profil Prabowo Subianto*, <http://Partaigerindra.or.id/profil-Prabowo-subianto-ketua-dewan-pembina-Partai-gerindra>, diakses tanggal 11 Maret 2019.

Desember 2004 di Jakarta dalam pencalonannya kali ini Prabowo menang dari pesaing-pesaingnya dengan memperoleh 309 suara mengalahkan pesaingnya yang merupakan Sekjen HKTI Agusdin Pulungan yang hanya meraih 15 suara dan satu abstein dari total 325 suara, serta terpilih menggantikan Siswono Yudo Husodo sebagai ketua HKTI periode 2004-2009.

Setelah sukses menjadi ketua HKTI, Prabowo mencalonkan dirinya sebagai ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), melalui Musyawarah Nasional (Munas) APPSI menyatakan bahwa Prabowo dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia untuk Periode 2008-2013, dan dilantik pada tanggal 6 Agustus 2008.

Setelah menjadi ketua HKTI dan APPSI serta banyak dikenal masyarakat karena gencarnya Prabowo tampil di televisi dalam bentuk iklan layanan masyarakat yang di sponsori Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Pada tahun 2008 juga Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).³³

Gerindra adalah Partai yang mewakili keragaman latar belakang tokoh pendirinya. Diawal pendiriannya, secara formal pada struktur Dewan Pimpinnan Pusat terdapat Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina dan TA Muliatna Djiwandono sebagai Bendahara Umum yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Soedradjad Djiwandono yang

³³ Ade Ma'ruf, (2017), *Prabowo Subianto: Jalan Terjal Seorang Jenderal*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, h. 138

telah menikahi kakak Prabowo bernama Bianti. Selain dari pada kerabat dekat, Prabowo juga membawa sejumlah anak buahnya semasa aktif sebagai tentara yakni Mayjen (Purn) Muchdi Pr dan Mayjen (Purn) Gleny Kairupan.³⁴

Tidak butuh waktu lama bagi Gerindra, hanya dalam waktu kurang dari tiga bulan sejak deklarasi, Gerindra lolos verifikasi Partai di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 4 April 2008. Tiga bulan setelah itu, Gerindra lolos verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU).³⁵ Selain membesarkan Partai, Gerindra mengembangkan sejumlah organisasi *underbouw*, seperti Satria (Satuan Relawan Indonesia Raya), Tidar (Tunas Indonesia Raya), Pira (Perempuan Indonesia Raya), Kira (Kristen Indonesia Raya).³⁶

Kendati apa yang diraih Gerindra dianggap cukup mencengangkan bagi Partai-Partai lama, namun nyatanya Gerindra hanya memperoleh suara pada tahun 2009 kurang dari 20 persen, inilah yang membuat Prabowo akhirnya bersedia menjadi calon wakil Praseiden Megawati Soekarnoputri dari PDIP. Keduanya mengambil motto “Mega-Prabowo”. Dalam berbagai iklan dan kampanyenya, pasangan Mega-Prabowo mengusung konsep ‘Ekonomi Kerakyatan’.³⁷

Pada Pilpres tahun 2009, terdapat pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik yang berkoalisi, berdasarkan Surat Keputusan KPU

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, h. 140

³⁶ *Ibid.*, h. 141

³⁷ *Ibid.*, h. 142

Nomor 297/KPTS/KPU/2009 maka ditetapkanlah Nomer urut pasangan capres-cawapres tahun 2009, Nomor 1 (satu) Mega-Prabowo, Nomor 2 (dua) SBY-Boediono, Nomor 3 (tiga) JK-Wiranto.³⁸

Pilpres tahun 2009 dimenangi oleh Paslon Nomor 2 (dua) SBY-Boediono dengan perolehan suara 60,80%, disusul oleh pasangan Nomor 1 (satu) Mega-Prabowo dengan perolehan suara 26,79% dan terakhir pasangan Nomor 3 (tiga) JK-Wiranto dengan perolehan suara 12,41%.³⁹ Dengan demikian maka pasangan Nomor 2 (dua) memenangi Pilpres tahun 2009 dengan satu putaran saja karena memperoleh suara 60,80%, karena sesuai UU No. 42 Tahun 2008 pasal 159 pasangan calon terpilih adalah yang memperoleh suara lebih dari 50%.⁴⁰

Kendati menerima kekalahan pahit di tahun 2009, nampaknya tidak membuat Prabowo menyerah untuk kursi tertinggi di Republik. terbukti ia kembali dicalonkan dalam Pilpres tahun 2014, tapi nuansa berbeda kali ini Prabowo yang menjadi capresnya.

Pada Pilpres tahun 2014, Prabowo diusung oleh Partai Koalisi yakni Partai Gerindra, PPP, PKS, PAN, PBB, Partai Golkar dengan memperoleh dukungan 48,93% suara atau 292 Kursi DPR,⁴¹ juga

³⁸ Kompas, *Ini dia, Nomor Urut Capres-Cawapres*, <https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 14 Maret 2019

³⁹ Badan Pusat Statistik, *Presentase Hasil Perhitungan Suara Sah Pilpres Tahun 2009 Menurut Provinsi*, <https://www.bps.go.id/statictable/2009/03/04/1574/hasil-perhitungan-suara-sah-pemilu-presiden-wakil-presiden-putaran-pertama-tahun-2004-2009-2014.html>, diakses tanggal 14 Maret 2019.

⁴⁰ Kompas, *Dilihat dari Rekap Suara, Pilpres Satu Putaran*, <https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 14 Maret 2019

⁴¹ Fathiyah Wardah, *6 Parpol Dukung Pasangan Prabowo-Hatta dalam Pilpres*, <https://www.voaindonesia.com/a/parpol-dukung-pasangan-Prabowo-hatta-dalam-pilpres/1917769.html>, diakses tanggal 14 Maret 2019

didukung oleh Partai Demokrat,⁴² berpasangan dengan Hatta Rajasa dengan Nomor 1 (satu). Pesaingnya Joko Widodo diusung oleh Partai Koalisi yakni PDIP, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura dan memperoleh 40,33% suara Legislatif,⁴³ berpasangan dengan Jusuf Kalla dengan Nomor 2 (dua) .

Pada Pilpres 2014, Prabowo harus menerima kenyataan pahit untuk kesekian kalinya, ia kembali kalah pada kontestasi tertinggi di Republik, pasangan Prabowo-Hatta kalah dari pasangan Jokowi-JK dengan presentase perolehan suara Prabowo Hatta 46,85% suara, dan Jokowi-JK 53,15% suara.⁴⁴ Maka pasangan Joko Widodo- Jusuf Kalla yang muncul sebagai pemenang Pilpres 2014.

Setelah kalah dalam Pilpres tahun 2014, Prabowo lebih sedikit muncul ke permukaan, ia jauh dari pemberitaan media, dan isu-isu Politik. Nama Prabowo mulai banyak diperbincangkan disaat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, kala itu Prabowo bersama Gerindra dan PKS mengusung Pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno (Anies-Sandi). Prabowo banyak diperbincangkan karena ia memilih Anies yang notabene orang Jokowi pada Pilpres tahun 2014, tepatnya juru kampanye Jokowi.

⁴² Rahmat Fiansyah, *Partai Demokrat resmi Dukung Prabowo-Hatta*, <https://nasional.kompas.com/read/2014/06/30/1659074/Partai.Demokrat.Resmi.Dukung.Prabowo-Hatta>, diakses tanggal 14 Maret 2019

⁴³ BBC, *Jokowi-JK resmi bakal Capres Cawapres*, <https://www.bbc.com>, diakses tanggal 14 Maret 2019

⁴⁴ Badan Pusat Statistik, *Presentase Hasil Perhitungan Suara Sah Pilpres Tahun 2014 Menurut Provinsi*, <https://www.bps.go.id/statictable/2009/03/04/1574/hasil-perhitungan-suara-sah-pemilu-presiden-wakil-presiden-putaran-pertama-tahun-2004-2009-2014.html>, diakses tanggal 14 Maret 2019.

Banyak pro-kontra mengenai keputusan Prabowo untuk mencalonkan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, mulai dari kader dan simpatisan Partai serta Partai Koalisi. Nampaknya mereka belum bisa menerima bahwa Anies Baswedan adalah musuh bersama di Pilpres tahun 2014, akan tetapi Prabowo mampu meyakinkan kader dan Partai Koalisi, untuk mencalonkan Anies-Sandi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

Dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 pula arah perpolitikan Indonesia berubah secara signifikan terutama internal umat Islam. Perubahan tersebut adalah akibat dari ucapan Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang merupakan calon Petahana pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, ia menyinggung orang-orang yang menyerang pribadinya menggunakan isu-isu agama, tepatnya dia menyebutkan soal Surah Al-Maidah ayat 51.

Rupanya atas pernyataannya itu memantik kemarahan umat Islam, terjadi demonstrasi besar-besaran yang menamai gerakan mereka dengan Aksi Bela Islam. Mereka menuntut agar Ahok di hukum atas dugaan penodaan Agama, atas gerakan umat tersebut maka muncullah Fatwa MUI bahwa Ahok benar telah Menodai Agama, atas fatwa tersebut maka muncul sebuah organisasi yang menamai dirinya dengan sebutan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-MUI (GNPF-MUI).

Setelah kemenangan Anies-Sandi Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, yang tidak luput dari berbagai Aksi Umat Islam yang kontra

terhadap Ahok, terutama GNPf-MUI. Hal itu membuat peta Pilpres tahun 2019 semakin jelas terlihat, karena aksi-aksinya orang-orang yang berada dalam tubuh GNPf-MUI tersandung kasus hukum, mereka menganggap kasus-kasus hukum yang menimpa orang-orangnya merupakan rekayasa untuk membungkam suara mereka yang terkesan sebagai pengkritik rezim.

Pada tanggal 27-29 Juli 2018, GNPf-Ulama yang dulunya merupakan GNPf-MUI melangsungkan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional. Adapun keputusan dalam acara itu adalah merekomendasikan dalam hal kepemimpinan nasional bahwa: (1) Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto, (2) Al Habib Dr. H. Salim Segaf Al-Jufri, (3) Ust. Abdul Somad Batubara, Lc., MA. Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres tahun 2019.⁴⁵

Berdasarkan hasil rekomendasi Ijtima Ulama tersebut, Prabowo belum memberikan keputusan, ia akan mempertimbangkannya bersama dengan Partai Koalisi. Setelah beberapa waktu Ust. Abdul Somad menolak dengan halus rekomendasi Ijtima Ulama, ia mengatakan sebaiknya dirinya tetap berada dijalur dakwah dan pendidikan umat, karena ia merasa bukan bidangnya berada di Politik dan Pemerintahan.

Waktu pendaftaran calon Capres-Cawapres semakin dekat, belum ada keputusan yang jelas dari Prabowo mengenai siapa yang akan menjadi wakilnya nanti yang mampu diterima oleh Koalisi Partai.

⁴⁵Muhammad Iqbal, *Ijtima Ulama Rekomendasikan Prabowo, Salim Segaf dan UAS Maju Pilpres*, <https://kumparan.com/@kumparannews/ijtima-ulama-rekomendasikan-Prabowo-salim-segaf-dan-uas-maju-pilpres-27431110790555842>, diakses tanggal 15 Maret 2019.

sementara UAS telah menolak tawaran Cawapres yang tersisa dari Ijtima Ulama hanya Habib Salim Segaf Al-Jufri, diluar dugaan pada babak akhir pemilihan Cawapres diumumkan Prabowo memilih Sandianga Salahuddin Uno Wakil Gubernur DKI Jakarta dan diterima Partai Koalisi.⁴⁶ Demikian tidak ada satupun Cawapres yang diambil dari rekomendasi Ijtima Ulama.

Setelah mendaftarkan diri ke KPU, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandianga Salahuddin Uno yang diusung oleh empat Partai Politik Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat.⁴⁷ Karena keputusan memilih Sandi membuat masyarakat banyak dilanda kebingungan disebabkan Prabowo tidak mengambil nama-nama yang direkomendasikan dalam Ijtima Ulama dan tokoh Nasional.

Menjawab polemik tersebut politisi PKS Mardani Ali Sera, mengatakan bahwa alasan Prabowo tidak mengambil cawapres dari hasil rekomendasi Ijtima Ulama adalah untuk tidak membenturkan antara Ulama. Karena pada saat sebelum deklarasi Prabowo-Sandi, Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin telah mendeklarasikan diri sebagai Capres-Cawapres pada Pilpres tahun 2019.⁴⁸

⁴⁶ Herlina KD dan Kiki Safitri, *Resmi, Prabowo Gandeng Sandianga Uno Melaju Ke Pilpres 2019*, <https://nasional.kontan.co.id/news/resmi-Prabowo-gandeng-sandianga-uno-melaju-ke-pilpres-2019>, diakses tanggal 15 Maret 2019

⁴⁷ Rahmatulloh, *Prabowo-Sandi Daftar ke KPU Bersama Empat Parpol Pendukung*, <https://nasional.sindonews.com/read/1329347/12/Prabowo-sandi-daftar-ke-kpu-bersama-empat-parpol-pendukung-1533885019>, diakses tanggal 15 Maret 2019

⁴⁸ Issak Ramadhani, *Ternyata Ini Alasan Prabowo Tidak Gandeng Ulama Jadi Cawapres*, <https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/11/08/2018/ternyata-ini-alasan-Prabowo-tidak-gandeng-ulama-jadi-cawapresnya>, diakses tanggal 15 Maret 2019

Setelah dua nama yang di rekomendasikan dalam Ijtima Ulama tidak terpilih sebagai Cawapres mendampingi Prabowo, GNPF Ulama belum memutuskan sikap untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandi. Karena pada kesempatan sebelumnya GNPF Ulama telah menawarkan alternatif Cawapres Ulama yang direstui oleh Imam Besar Habib Rizieq Shihab yakni Ust. Arifin Ilham dan AA Gym.⁴⁹

Setelah melalui pertimbangan, maka GNPF Ulama kembali menggelar Ijtima Ulama dan tokoh Nasional Jilid II dalam hal menentukan arah dukungan untuk kontestasi Pilpres tahun 2019. Terdapat dua hasil keputusan dalam Ijtima Ulama dan tokoh Nasional dalam Surat Keputusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional II Nomor 01/IJTIMA/GNPF-ULAMA/MUHARRAM/1440 H tentang penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden.⁵⁰

Poin pertama “Menetapkan Letnan Jenderal Haji Prabowo Subianto sebagai calon presiden pemilihan presiden tahun 2019 dan Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden tahun 2019”. Ditandatangani oleh petinggi GNPF dengan ketua Dani Anwar, maka atas dasar tersebut peserta Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional memiliki

⁴⁹ Yuliana Ratnasari, *GNPF Ulama Belum Tentukan Sikap Dukung Prabowo-Sandiaga*, <https://tirto.id/GNPF-ulama-belum-tentukan-sikap-dukung-Prabowo-sandiaga-cRvs>, diakses tanggal 15 Maret 2019

⁵⁰ Francisca Christy Rosana, *Prabowo Tandatangani Fakta Integritas Ijtima Ulama II, Ini Isinya*, <https://nasional.tempo.co/read/1127023/Prabowo-tandatangani-pakta-integritas-ijtima-ulama-ii-ini-isinya/full&view=ok>, diakses tanggal 15 Maret 2019

kewajiban untuk mendukung pasangan calon yang telah disetujui untuk diusung.⁵¹

Keputusan kedua, yang diatur dalam Surat Keputusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional II Nomor 02/IJTIMA/GNPF-ULAMA/MUHARRAM/1440 H tentang Pakta Integritas Calon Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai dengan surat tersebut, Prabowo dan Sandiaga berhak menyatakan kesanggupannya bila keduanya terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, ada 17 poin yang Prabowo-Sandi diminta sanggup mewujudkannya antara lain berpihak pada kepentingan rakyat, menjaga nilai-nilai religius dan memperhatikan kepentingan umat beragama.⁵²

Beberapa hal diatas yang peneliti cantumkan adalah proses pencalonan Prabowo sebagai Capres pada Pilpres tahun 2019. Juga hubungan yang terjalin antara Prabowo dengan GNPF-Ulama, itu semua adalah sekelumit peristiwa ditengah proses pencalonan seorang Prabowo Subianto sebagai Calon presiden.

B. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI/Ulama

1. Awal Kemunculan GNPF-MUI

Sejarah terbentuknya GNPF-MUI/Ulama tidak bisa dilepas dari peristiwa penistaan agama yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Atas perbuatan ahok inilah

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

terjadi gelombang protes dan demonstrasi besar-besaran umat Islam di Indonesia.

Pada tanggal 27 September 2016, Ahok melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu, dalam rangka menebar 4.000 benih ikan. Dia juga berdialog dengan masyarakat setempat, ditengah dialog tersebut Ahok menghimbau agar masyarakat tidak usah khawatir terhadap kebijakan Pemerintahannya apabila ia tidak terpilih kembali, disaat itu juga Ahok menyinggung Ayat Al-Qur'an yakni Surah Al-Maidah ayat 51 yang menjadi polemik.⁵³

Selanjutnya pada 28 September 2016, Pemerintah DKI Jakarta mengunggah Video pidato Ahok didepan Masyarakat Kepulauan Seribu di Youtube.⁵⁴ Lantas video Ahok menjadi viral dan mendapat reaksi kemarahan dari publik ketika videonya itu di unggah oleh Akun Buni Yani di akun *Facebook* miliknya pada 6 Oktober 2016.⁵⁵

Setelah menuai reaksi kemarahan dari publik, pada 7 Oktober 2016 Ahok dilaporkan oleh Habib Chaidir Hasan dengan Laporan Polisi Nomor LP/1010/X/2016 Bareskrim. Ahok dilaporkan atas dugaan tindak pidana penghinaan Agama.⁵⁶ Karena aksinya banyak menuai

⁵³ Dedi Rahmadi, *Kasus Penistaan Agama Oleh Ahok Hingga Dibui 2 Tahun*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penistaan-agama-oleh-ahok-hingga-dibui-2-tahun.html>, diakses tanggal 16 Maret 2019.

⁵⁴ Asfahan Yahsyi, *Kronologi Kasus Ahok: Dari Penodaan ke Pernyataan Permusuhan*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170509062010-15-213306/kronologi-kasus-ahok-dari-penodaan-ke-pernyataan-permusuhan>, diakses tanggal 16 Maret 2019.

⁵⁵ Dwiwarso Budi Santiarto, *Ini Kisah perjalanan Kasus Ahok Hingga Vonis 2 Tahun Penjara*, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/05/09/ini-kisah-perjalanan-kasus-ahok-hingga-vonis-2-tahun-penjara?page=2>, diakses tanggal 16 Maret 2019.

⁵⁶ Yantina Debora, *Kronologi Kasus Dugaan Penistaan Agama*, <https://tirto.id/kronologi-kasus-dugaan-penistaan-agama-b457>, Diakses tanggal 03 Desember 2018.

kontroversi ditengah masyarakat akhirnya pada 10 Oktober 2016, Ahok resmi meminta maaf dan menyatakan bahwa ia Tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan umat Islam.

Pihak Kepolisian meminta Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwanya dalam hal menentukan kasus Ahok sebagai sebuah penistaan terhadap Agama. Seiring dengan polemik yang ada MUI menyatakan Sikap Keagamaan yang menyatakan bahwa Ahok benar-benar melakukan penodaan Agama dengan mengutip Surat Al-Maidah ayat 51, pernyataan sikap Keagamaan MUI ini disampaikan pada tanggal 11 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum MUI KH. Ma'ruf Amin dan Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Anwar Abbas.⁵⁷

Penyataan permohonan maaf Ahok nampaknya belum bisa diterima oleh umat Islam secara keseluruhan, tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2016. Pecah demonstrasi yang dilakukan beberapa Ormas Islam salah satunya Front Pembela Islam di bawah kepemimpinan Habib Muhammad Rizieq Shihab, mereka menamai aksinya dengan sebutan Aksi Bela Islam dengan tuntutan agar Kepolisian mengusut tuntas kasus Penistaan Agama yang dilakukan oleh Ahok. Karena merasa tidak ada tanggapan para demonstran mengumumkan akan

⁵⁷ Indah Mutiara, *MUI Nyatakan Sikap Soal Ucapan Ahok Terkait Al Maidah 51*, <https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya>, Diakses pada tanggal 03 Desember 2018.

menggelar demo lanjutan pada 4 November 2016 dengan nama Aksi Bela Islam II.⁵⁸

Setelah adanya sikap keagamaan atau fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, mucullah sebuah gerakan dari masyarakat dan para Ulama yang menamai gerakan mereka dengan sebutan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Kemudian GNPF-MUI inilah yang terus mengawal kasus Penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok terhitung sejak Aksi Bela Islam II.

Aksi Bela Islam II dilakukan pada tanggal 4 November 2016 dengan istilah Aksi 411, didalam aksi kali ini yang dihadiri oleh massa yang begitu besar berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Massa yang hadir ditaksir mencapai ratusan ribu orang dan banyak Ulama dengan latar belakang ormas yang berbeda, yang berpusat didepan Istana Negara. Massa menuntut agar Presiden Joko Widodo dapat menemui mereka dan meuntut agar Presiden tidak mengintervensi kasus ini, namun sayang hingga malam Presiden tidak menemui massa yang menunggunya hingga akhirnya aksi tersebut berakhir ricuh.⁵⁹

Setelah mengadakan Aksi Bela Islam II, GNPF-MUI mengungkapkan bahwa akan menggelar Aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016 di Lapangan Monumen Nasional (Monas) yang dikenal dengan aksi 212. Aksi ini menuntut agar ahok dipenjara dan

⁵⁸ Dedi Rahmadi, *Kasus Penistaan Agama Oleh Ahok Hingga Dibui 2 Tahun*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penistaan-agama-oleh-ahok-hingga-dibui-2-tahun.html>, diakses tanggal 16 Maret 2019

⁵⁹ *Ibid.*

akan aksi ini diikuti oleh 67 ormas.⁶⁰ Karena sebelumnya Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka pada 16 November 2016 berdasarkan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,⁶¹ tapi tidak kunjung dipenjara. Selanjutnya berbagai aksi dipelopori oleh GNPF-MUI sampai dengan Ahok divonis bersalah oleh Majelis Hakim pada 9 Mei 2017.⁶²

Pada awal kemunculannya GNPF-MUI menyebutkan nama pengurusnya, Ketua Dewan Pembina GNPF-MUI Habib Muhammad Rizieq Shihab, Ketua Umum GNPF-MUI Ust. Bachtiar Natsir, Wakil Ketua Umum Ust. Zaintun Rusmin, Sekjen Munarman, Bendahara Umum Lutfie Hakim.

2. Kasus Hukum Orang-orang Dalam GNPF-MUI

GNPF-MUI sejak awal kemunculannya sebagai gerakan untuk mengawal fatwa MUI dalam hal kasus penistaan Agama yang dilakukan Ahok, telah membuat Partai-Partai pengusung Ahok yang notabene merupakan Partai Koalisi Pemerintah yang berkuasa merasa geram dengan gerakan-gerakan yang dilakukannya. Kasus Penistaan

⁶⁰ Eko Supriyadi, *Habib Rizieq Jamin Aksi Bela Islam III Berjalan Super Damai*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/11/18/ogtojh382-habib-rizieq-jamin-aksi-bela-islam-iii-berjalan-super-damai>, diakses tanggal 14 Maret 2019.

⁶¹ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, *Bareskrim Tetapkan Ahok sebagai Tersangka Penistaan Agama*, <https://nasional.kompas.com/read/2016/11/16/10083881/bareskrim.tetapkan.ahok.sebagai.tersangka.penistaan.agama>, diakses tanggal 16 Maret 2019

⁶² Rina Atriana, *Ahok Divonis 2 Tahun Penjara*, <https://news.detik.com/berita/d-3496185/ahok-divonis-2-tahun-penjara>, diakses tanggal 16 Maret 2019

Agama Ahok yang bertepatan dengan akan diselenggarakannya Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

Gerakan-gerakan yang dilakukan GNPF-MUI membuat citra Ahok sangat bobrok dikalangan para pemilih muslim di DKI Jakarta, tidak hanya sebatas DKI Jakarta tapi juga didaerah-daerah di Indonesia. Gerakan anti Ahok telah menjelma hampir di seluruh penjuru republik, didalam banyak kesempatan juga GNPF-MUI lewat orang-orangnya kerap kali mengkritik kebijakan Pemerintah, mulai dari isu PKI, Pekerja Asing yang menyangkut kedaulatan Negara.

Setelah kerap kali mengkritik Pemerintah, GNPF-MUI di curigai sebagai gerakan dari pihak Oposisi, karena banyak sekali politisi-politisi dari Partai Oposisi Pemerintah, Gerindra dan PKS, juga tokoh-tokoh yang sejak awal bersikap kontra terhadap kebijakan rezim ikut serta dalam berbagai Aksi Bela Islam. Puncaknya sebelum diadakan acara Aksi Bela Islam III terjadi penangkapan orang-orang yang diduga akan melakukan makar terhadap Pemerintah lewat aksi 2 Desember 2016.

Temuan kepolisian terhadap adanya upaya pemukatan jahat atau makar terhadap Pemerintah memutuskan menangkap sepuluh orang, mulai dari purnawirawan TNI, Politisi, Aktivis Politik dan seniman. Kesepuluh nama-nama itu adalah Ahmad Dhani, Mayjen (Purn) Kivlan Zen, Brigadir jenderal (Purn) Adityawarman Thaha, ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein, Rachmawati

Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, Rizal Kobar, Jamran dan Eko.⁶³

Selain terhadap ke sepuluh orang tersebut, tuduhan makar yang berakhir kepada penangkapan dan penahanan juga terjadi terhadap Sekjen Forum Umat Islam (FUI) sekaligus Ulama aktif dalam GNPf-MUI KH. Muhammad Al-Khaththath. Namun tuduhan tersebut tidak bertepatan dengan aksi 212 melainkan pada Aksi 313 (31 Maret 2017).⁶⁴

Katidaknyamanan Partai Koalisi Pemerintah sekaligus pengusung Ahok, terhadap GNPf-MUI bukan tanpa alasan, aktifitas GNPf-MUI inilah yang menjadi sebabnya, maka daripada itu terciptalah kasus-kasus yang menimpa orang-orang dari GNPf-MUI. Kasus-kasus tersebut seolah ingin membungkam suara kritis mereka atas tindakan Ahok dan carut-marutnya penegakan hukum terhadapnya.

Beberapa kasus yang menimpa orang-orang yang terkenal vokal didalam tubuh GNPf-MUI, seperti kasus chat mesum Habib Rizieq dengan Firza Husein, kasus penistaan pelancang bali oleh Munarman salah satu orang GNPf-MUI sekaligus FPI, Kasus Pencucian uang Ust. Bachtiar Nasir. Kesemua kasus ini bermunculan kepermukaan setelah banyak sekali kritik dan aksi demonstrasi yang dilakukan

⁶³ Gloria Safira Taylor, *Mabes Polri: Aksi 212 Bisa Jadi Digunakan Untuk Makar*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161202171822-12-176937/mabes-polri-aksi-212-bisa-jadi-digunakan-untuk-makar>, diakses tanggal 17 Maret 2019

⁶⁴ Dr. M. Kapitra Ampera, *Tuduhan Makar Bentuk Kejahatan Negara*, <http://www.belaquran.com/2017/04/tuduhan-makar-bentuk-kejahatan-negara.html>, diakses tanggal 17 Maret 2019.

Ulama-Ulama GNPf-MUI ini, pihak GNPf-MUI menuding bahwa ini ada Kriminalisasi terhadap orang-orangnya, sementara Kepolisian dan Pemerintah menampiknya dengan berkata bahwa itu murni tindak penegakan hukum.

Selain kasus hukum yang melilit seorang Habib Rizieq, ternyata banyak aksi-aksi teror yang mengancam nyawa Habib Rizieq, nampaknya hal inilah yang pada akhirnya membuat sang Habib memutuskan untuk sementara menetap di Saudi Arabiah. Dalam beberapa kesempatan Habib Rizieq mengatakan bahwa ia ingin pulang ke tanah air tapi hal itu tidak kunjung terlaksana disebabkan ada beberapa persoalan hukum yang terang benderang, maka menghambat pulangnya sang Habib.

Habib Rizieq sendiri tersandung 17 kasus hukum dan diklain sebagai rekayasa oleh Haikal Hasan (Anggota dewan Pembina GNPf Ulama), dari ke 17 kasus tersebut hanya terdapat 2 kasus yang sudah dihentikan atau SP3.⁶⁵ Nampaknya hal inilah salah satu faktor penghambat kepulangan Habib Rizieq.

Selain begitu banyak kasus hukum yang menimpa Habib Rizieq yang menjadi salah satu indikator terhambatnya kepulangan beliau ke Indonesia, ada pula teror yang kerap terjadi kepadanya sewaktu masih menetap di tanah air, beberapa aksi teror Habib Rizieq antara lain:

⁶⁵ CNN Indonesia TV, *GNPF Sebut Jokowi Bukan Penghalang Rizieq Shihab Pulang*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180918080913-12-330967/GNPF-sebut-jokowi-bukan-penghalang-rizieq-syihab-pulang>, diakses tanggal 17 Maret 2019

Pada tanggal 16 April 2017 Tragedi cawang, Mobil dibakar dan diluncurkan dari atas *Flyover* Cawang Kompur yang hampir melukai jamaah. Pihak FPI menduga hal tersebut sengaja dilakukan untuk melukai Habib Rizieq, karena mereka menemukan ada dua mobil yang terparkir yakni mobil Kijang Kapsul dengan plat Nomor B 7208 EQ serta Kijang Grand dengan plat Nomor B 1552 AH, dalam kedua mobil tersebut ditemukan 8 jeriken besar berisi bensin.⁶⁶

Selanjutnya pada tanggal 25 April 2017, terjadi penembakan dirumah Habib Rizieq di Megamendung, tepatnya di pendopo yang biasa digunakan Habib untuk berzikir. Insiden ini disebutkan sebagai teror penembak jitu/*Sniper* yang hendak menghabisi Habib sesuai zikir pagi di rumahnya itu.⁶⁷ Sejak kejadian inilah Habib Rizieq bersama anggota keluarganya pergi keluar negeri.

3. Pertemuan GNPF-MUI dengan Presiden Jokowi

Setelah Ahok diputuskan bersalah, memang aktivitas dari GNPF sendiri agak berkurang, tapi hal itu tidak membuat hubungan antara GNPF-MUI dengan Pemerintah kunjung membaik. Habib Rizieq Shihab yang terpaksa hijrah ke Saudi Arabia karena begitu banyak aksi teror dan tuntutan kasus hukum terhadapnya, menjadi penyebab kian renggangnya hubungan Pemerintah dengan GNPF-MUI.

⁶⁶ Muhyiddin, *Jubir FPI Ungkap Pelaku Teror Terhadap Habib Rizieq di Cawang*, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/04/16/oohtbo382-jubir-fpi-ungkap-pelaku-teror-terhadap-habib-rizieq-di-cawang>, diakses tanggal 17 Maret 2019

⁶⁷ Aloisius H Manggol, *Kamar Pribadi Habib Rizieq Ditembak Sniper, Begini Kondisi Habib Rizieq*, <http://bali.tribunnews.com/2017/04/28/kamar-pribadi-habib-rizieq-ditembak-sniper-begini-kondisi-habib-rizieq?page=2>. Diakses tanggal 17 Maret 2019

Kendati demikian tidak disangka terjadi pertemuan antara pengurus GNPF-MUI dengan Presiden, pertemuan itu berlangsung pada momentum hari kemenangan umat Islam yakni pada saat perayaan Idul Fitri. Adapun orang yang menghadiri pertemuan antara kedua belah pihak adalah Us. Bachtiar Nasir, Ust. Muhammad Yusuf Martak, Ust. Zaitun Rusmin, Kapitra Ampera, Habib Muchsin serta Muhammad Lutfi Hakim, Presiden Joko Widodo, Menkopolkam Wiranto, Mensesneg Pratikno, dan Menag Lukman Hakim Syaifudin.⁶⁸

Menurut Ust. Zaitun Rusmin pertemuan tersebut merupakan langkah awal dari sebuah rekonsiliasi antar kedua belah pihak, memperbaiki komunikasi dan silaturahmi. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Ust. Bachtiar Nasir dan pengurus lainnya, karena selama ini hubungan GNPF-MUI dengan Pemerintah kurang harmonis karena terdapat banyak prasangka antar kedua belah pihak, maka dengan pertemuan ini semuanya *clear*, tambah Ust. Muhammad Lutfi Hakim.⁶⁹

Kendati demikian pernyataan dari pengurus GNPF-MUI perihal pertemuan tersebut, beredar kabar yang tidak menyenangkan dari masyarakat dan pendukung Habib Rizieq yang mempertanyakan maksud pertemuan tersebut. Mengenai polemik yang ada, Habib Rizieq melalui rekaman suara menjernihkan suasana sembari

⁶⁸ Fabian Januarius Kuwado, *Saat Jokowi dan GNPF-MUI bertemu*, <https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 17 Maret 2019

⁶⁹ *Ibid.*

menjelaskan apa yang dilakukan pengurus GNPf-MUI bukanlah pelemahan perjuangan apalagi penghianatan, melainkan bagian peran GNPf sejak awal berdiri.⁷⁰

4. Berganti Nama dari GNPf-MUI Menjadi GNPf-Ulama

Setelah Ahok di penjara, muncul sebuah pertanyaan di benak masyarakat, apakah GNPf-MUI dibubarkan setelah kasus Ahok telah mencapai babak akhir. Menanggapi hal tersebut Ketua Umum GNPf-MUI Ust Bahtiar Nasir mengatakan belum bisa memastikan tetap berlanjut atau dibubarkan, karena menurut Ust. Bahtiar Nasir GNPf-MUI adalah panitia sementara yang dibentuk untuk memperjuangkan dan mengawal fatwa Ulama yang dikeluarkan secara resmi oleh MUI.⁷¹

Namun pertanyaan tersebut telah terjawab, karena pada tanggal 30 Oktober 2017 GNPf-MUI tidak bubar melainkan hanya berganti nama menjadi GNPf Ulama. Mengenai pergantian nama ini Ust. Bahtiar Nasir selaku Ketua Umum GNPf Ulama menjelaskan bahwa pergantian ini bertujuan agar nama MUI tidak diberatkan dan diseret-seret dalam setiap sikap dan kegiatan GNPf, dan GNPf sendiri lebih

⁷⁰ Diko Oktara, *Riziek FPI: GNPf MUI dan Jokowi Bertemu, Bukan Penghianatan*, <https://nasional.tempo.co/read/888366/riziek-fpi-gnpf-mui-dan-jokowi-bertemu-bukan-penghianatan/full&view=ok>, diakses tanggal 17 Maret 2019

⁷¹ Imam Solehudin, *Ahok dibui, GNPf-MUI Bubar atau Bertahan? Ini Jawabannya*, <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/05/2017/ahok-dibui-gnpf-mui-bubar-atau-bertahan-ini-jawabannya>, diakses tanggal 16 Maret 2019

bebas dalam melaksanakan kegiatannya, karena menurutnya Ust. Bachtiar Nasir MUI mempunyai privasinya sendiri.⁷²

Kemudian Ust. Muhammad Yusuf Martak juga menambahkan bahwa pergantian nama dari GNPf-MUI menjadi GNPf Ulama adalah karena GNPf bertekad mengawal fatwa para Ulama secara umum, dan tetap istiqomah mengawasi fatwa Ulama.⁷³

5. Pergantian Kepengurusan GNPf-Ulama

Setelah pengilangan nama MUI dengan digantikan Ulama pada 30 Oktober 2017, terjadilah pergantian kepengurusan GNPf Ulama. Ada yang mengaitkan pergantian kepengurusan ini dengan perpecahan internal organisasi karena sebab GNPf yang dipimpin Ust. Bachtiar Nasir telah melakukan penyelewengan dengan mendekati istana.

Terkait isu tersebut Habib Rizieq mengungkapkan tidak ada hal-hal tersebut seperti perpecahan dalam tubuh GNPf, melainkan hanya terjadi perubahan kepengurusan GNPf yang semula menganut sistem sentralistik yang kemudian berdasarkan hasil dari musyawarah antara pendiri maupun pengurus GNPf menjadi kepemimpinan kolektif kolegal. Habib Rizieq juga mengungkapkan bahwa pergantian

⁷² Adhitya Himawan, *GNPF-MUI kini resmi Ganti Nama Jadi GNPf Ulama*, <https://www.suara.com/news/2017/10/30/144143/GNPF-mui-kini-resmi-ganti-nama-jadi-GNPF-ulama>, diakses tanggal 16 Maret 2019

⁷³ Rina Ayu Panca Rini, *GNPF MUI Berubah Nama jadi GNPf Ulama untuk perjuangkan Misi yang Lebih Luas*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/13/GNPF-mui-berubah-nama-jadi-GNPF-ulama-untuk-perjuangkan-misi-yang-lebih-luas>, diakses tanggal 17 Maret 2019.

kepengurusan tersebut adalah hal sangat wajar dalam sebuah organisasi.⁷⁴

Ust. Yusuf Martak selaku Ketum GNPf Ulama yang baru mengungkapkan, bahwa perombakan kepengurusan ini hanya untuk memaksimalkan kinerja organisasi, sekaligus perubahan sistem kepemimpinan yakni sistem kolektif kolegial akan lebih merangkul semua elemen organisasi.⁷⁵ Habib Rizieq juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada pengurus lama, terutama Ust. Bachtiar Nasir, karena telah memimpin GNPf-MUI sehingga dapat melakukan hal yang begitu monumetal dan beliau berhasil memimpin GNPf mencapai tujuannya sebagaimana diharapkan oleh umat Islam ketika itu.⁷⁶

Sebelumnya pada 12 Maret 2018, GNPf Ulama melakukan Konferensi Pers tentang pergantian kepengurusan dan sistem kepemimpinan, Ketua Umum Ust. Bachtiar Nasir digantikan oleh Ust. Muhammad Yusuf Martak, Sekjen yang sebelumnya diisi oleh Ust. Munarman diganti oleh Ust. Muhammad al-Khatthath. Selain itu pergantian Ust. Bachtiar Nasir sebagai Ketum GNPf adalah karena

⁷⁴ Kanavino Ahmad Rizqo, *GNPF-Ulama Rombak Kepengurusan, Habib Rizieq Ini Bukan Perpecahan*, <https://news.detik.com/berita/d-3911871/GNPF-ulama-rombak-kepengurusan-habib-rizieq-ini-bukan-perpecahan>, diakses tanggal 17 Maret 2019

⁷⁵ Novita Intan, *Pengurus GNPf Ulama Diubah, Bachtiar Nasir Tidak Jabat Ketum*, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/03/12/p5hj6n415-pengurus-gn-pf-ulama-diubah-bachtiar-nasir-tidak-jabat-ketum>, diakses tanggal 17 Maret 2019

⁷⁶ Kanavino Ahmad Rizqo, *GNPF Ulama Rombak Kepengurusan, Habib Rizieq Apresiasi Bachtiar Nasir*, <https://news.detik.com/berita/3911918/GNPF-ulama-rombak-kepengurusan-habib-rizieq-apresiasi-bachtiar-nasir>, diakses tanggal 17 Maret 2019

kesibukan beliau yang begitu padat.⁷⁷ Setelah tidak menjabat Ketum lagi Ust. Bahtiar Nasir menjadi Anggota Dewan Pembina.⁷⁸

6. Keterkaitan dengan Kontestasi Pilpres tahun 2019

Keterkaitan GNPf Ulama pada kontestasi Pilpres tahun 2019 tidak bisa lepas dari latarbelakang historis pergerakan GNPf-MUI pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, dimana ketika itu berkat aksi-aksinya GNPf-MUI bisa memporak-porandakan elektabilitas Calon Gubernur petahana. Rupanya tidak hanya sebatas citra Ahok yang terbilang tergerus, tapi juga citra Partai-Partai pengusung Ahok juga terkena imbas dari pergerakan GNPf-MUI atas penistaan agama yang dilakukan Ahok.

Nampaknya hal tersebut ikut terseret kepada Pilpres tahun 2019, karena pada saat GNPf-MUI menuntut penindakan tegas kasus penistaan agama oleh Ahok, pergerakan mereka di tuduhkan sebagai gerakan Intoleransi, Anti-NKRI, Radikal, Anti-Kebhinekaan, serta Makar. Berbagai macam tuduhan ini dilontarkan oleh para pendukung Ahok dan Partai pengusungnya kala itu, sehingga terciptalah hubungan yang kurang harmonis antara Partai pengusung Ahok yang juga merupakan Koalisi Pemerintah.

⁷⁷ Novita Intan, *Pengurus GNPf Ulama Diubah, Bahtiar Nasir Tidak Jabat Ketum*, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/03/12/p5hj6n415-pengurus-gnpf-ulama-diubah-bahtiar-nasir-Tidak-jabat-ketum>, diakses tanggal 17 Maret 2019

⁷⁸ Kanavino Ahmad Rizqo, *GNPF Ulama Rombak Kepengurusan, Habib Rizieq Apresiasi Bahtiar Nasir*, <https://news.detik.com/berita/3911918/GNPF-ulama-rombak-kepengurusan-habib-rizieq-apresiasi-bahtiar-nasir>, diakses tanggal 17 Maret 2019

Selain hal itu, Habib Rizieq yang tidak kunjung pulang juga menjadi suatu alasan kenapa hubungan Pemerintah dan GNPF tidak kunjung menemui titik kesepakatan untuk duduk pada barisan yang sama. Seperti yang telah diketahui Habib Rizieq adalah Ulama yang menjadi bisa dibilang kepalanya dari GNPF segala kegiatan dan tindak tanduk GNPF selalu atas restu beliau meskipun sedang berada di luar negeri.

Hal tersebut terbukti, pada tanggal 27-29 Juli 2018 diselenggarakan Ijtima 'Ulama oleh GNPF-Ulama, yang diikuti 600 Ulama dan tokoh nasional dari seluruh Provinsi di Indonesia. Ijtima Ulama juga dihadiri oleh lima (5) pimpinan Partai Politik yakni Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden PKS M. Sohibul Iman, Ketum Pan Zulkifli Hasan, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan Ketum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra.⁷⁹

Keputusan dari Ijtima Ulama adalah merekomendasikan Letjen (Purn) H. Prabowo Subianto, Al Habib Dr. H. Salim Segaf Al-Jufri, Ust. Abdul Somad Batubara, Lc., MA. Sebagai calon presiden dan Wakil Presiden yang akan didaftarkan oleh Partai Koalisi Keumatan ke KPU.

Berdasarkan hasil rekomendasi Ijtima Ulama tersebut, Prabowo belum memberikan keputusan, ia akan mempertimbangkannya bersama dengan Partai Koalisi. Setelah beberapa waktu Ust. Abdul

⁷⁹ Muhammad Iqbal, *Rekomendasi Lengkap Ijtima Ulama Untuk Pilpres 2019*, <https://kumparan.com>, diakses tanggal 21 Maret 2019

Somad menolak dengan halus rekomendasi Ijtima Ulama, ia mengatakan sebaiknya dirinya tetap berada dijalur dakwah dan pendidikan umat, karena ia merasa bukan bidangnya berada di Politik dan Pemerintahan.

Setelah Ust. Abdul Somad menolak untuk mencalonkan dirinya sebagai Cawapres Prabowo, hanya tinggal satu nama hasil rekomendasi Ijtima Ulama yakni Al-Habib Salim Segaf Al-Jufri yang juga Ketua Majelis Syuro PKS, sementara tenggat waktu semakin dekat belum ada keputusan yang jelas dari Prabowo dan Partai Koalisi. Nama Habib Salim nampaknya kurang bisa diterima dengan baik oleh Parpol Koalisi karena posisinya sebagai Ketua Majelis Syuro PKS.

Menanggapi dua nama yang direkomendasikan oleh Ijtima Ulama tidak bisa mendampingi Prabowo, Ust. Abdul Somad yang memilih jalan dakwah, sedangkan Habib Salim tidak bisa diterima oleh Partai Koalisi. GNPF Ulama telah menawarkan alternatif Cawapres Ulama yang direstui oleh Imam Besar Habib Rizieq Shihab yakni Ust. Arifin Ilham dan AA Gym.⁸⁰

Hal yang diluar dugaan pada babak akhir pemilihan Cawapres diumumkan Prabowo memilih Sandianga Salahuddin Uno Wakil

⁸⁰ Yuliana Ratnasari, *GNPF Ulama Belum Tentukan Sikap Dukung Prabowo-Sandiaga*, <https://tirto.id/GNPF-ulama-belum-tentukan-sikap-dukung-Prabowo-sandiaga-cRvs>, diakses tanggal 15 Maret 2019

Gubernur DKI Jakarta dan diterima Partai Koalisi.⁸¹ Demikian tidak ada satupun Cawapres yang diambil dari rekomendasi Ijtima Ulama. Setelah keputusan yang diambil adalah Sandiaga sebagai Cawapres, GNPF belum menentukan sikapnya untuk ikut mendukung pasangan calon capres-cawapres Prabowo-Sandi.

Mengenai hal tersebut GNPF Ulama kembali menggelar Ijtima Ulama dan tokoh Nasional Jilid II dalam hal menentukan arah dukungan untuk kontestasi Pilpres tahun 2019. Terdapat dua hasil keputusan dalam Ijtima Ulama dan tokoh Nasional dalam Surat Keputusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional II Nomor 01/IJTIMA/GNPF-ULAMA/MUHARRAM/1440 H tentang penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden.⁸²

Poin pertama “Menetapkan Letnan Jenderal Haji Prabowo Subianto sebagai calon presiden pemilihan presiden tahun 2019 dan Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden tahun 2019”. Ditandatangani oleh petinggi GNPF dengan ketua Dani Anwar, maka atas dasar tersebut peserta Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional memiliki kewajiban untuk mendukung pasangan calon yang telah disetujui untuk diusung.⁸³

⁸¹ Herlina KD dan Kiki Safitri, *Resmi, Prabowo Gandeng Sandiaga Uno Melaju Ke Pilpres 2019*, <https://nasional.kontan.co.id/news/resmi-Prabowo-gandeng-sandiaga-uno-melaju-ke-pilpres-2019>, diakses tanggal 15 Maret 2019

⁸² Francisca Christy Rosana, *Prabowo Tandatangani Fakta Integritas Ijtima Ulama II, Ini Isinya*, <https://nasional.tempo.co/read/1127023/Prabowo-tandatangani-pakta-integritas-ijtima-ulama-ii-ini-isinya/full&view=ok>, diakses tanggal 15 Maret 2019

⁸³ *Ibid.*

Keputusan kedua, yang diatur dalam Surat Keputusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional II Nomor 02/IJTIMA/GNPF-ULAMA/MUHARRAM/1440 H tentang Pakta Integritas Calon Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai dengan surat tersebut, Prabowo dan Sandiaga berhak menyatakan kesanggupannya bila keduanya terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, ada 17 poin yang Prabowo-Sandi diminta sanggup mewujudkannya antara lain berpihak pada kepentingan rakyat, menjaga nilai-nilai religius dan memperhatikan kepentingan umat beragama.⁸⁴

⁸⁴ *Ibid.*